

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan yang sangat sukses sepanjang masa tanpa ketinggalan zaman. Salah satu sekolah tradisional pertama di Indonesia yang berfokus pada pendidikan nonformal disebut Pesantren. Pondok pesantren didirikan dan sejak itu berkembang hingga ke seluruh Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam dan tempat untuk melanjutkan pendidikan agama.

Akulturası budaya Islam dan Hindu-Buddha yang dilakukan masyarakat Indonesia menyebabkan lahirnya pesantren yang merupakan lembaga yang sama sekali baru dengan ciri khas Indonesia yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya (Choirul Fuad Yusuf dkk, 2010: 189).

Dalam perjalanan umat Islam di Indonesia, pondok pesantren memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi kegiatan *tafaqqahu fi addin* (pendidikan, pemahaman serta penajaman ajaran Islam) dan fungsi kedua *indzar* (menyiarkan juga mendakwahkan agama Islam pada masyarakat). Dari kedua fungsi tadi, pondok pesantren pada umumnya sudah merealisasikan (Didin Hafidhuddin, 2000:120-121).

Pesantren semakin populer dan diminati seiring berkembangnya dunia modern. Pondok pesantren sebenarnya perlu mengatur seluruh operasionalnya agar dapat mencapai tujuan utamanya. Tidak hanya pesantren yang berkembang pesat, namun pesantren yang baru dibangun atau didirikan juga memerlukan

sistem pengawasan dari seluruh komponennya, terutama dari pimpinan umum. Dalam suatu lembaga, baik lembaga pesantren maupun sekolah, tanpa adanya proses manajemen maka tidak akan memiliki kegiatan teratur, karena pengawasan merupakan salah satu di antara unsur manajemen yang wajib ada di dalam suatu lembaga atau organisasi.

Dalam setiap jenis lingkungan pendidikan, pengawasan sangatlah penting. Meninjau apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan merupakan tujuan pengawasan. Untuk mengarahkan orang lain agar bekerja menuju hasil yang diinginkan, pengawasan berpusat pada tugas yang ada atau objek yang akan dikerjakan. Untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar, akurat, dan sesuai dengan apa yang telah diputuskan, maka pimpinan harus merencanakan dan mengawasinya untuk mencegah potensi penyimpangan dan kecurangan. Tanpa melakukan upaya pengawasan yang baik maka berbagai kegiatan yang ada di organisasi takkan berlangsung dengan baik, karena pengawasan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan begitu, pengawasan menjadi unsur yang begitu urgen dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi.

Selain mendeteksi berbagai anomali, sistem pemantauan juga perlu membantu upaya pemecahan masalah dengan mengambil keputusan. Sistem tersebut harus mampu menjelaskan penyebab penyimpangan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya.

Sama halnya dengan yang ada di pesantren, sistem pengawasan menjadi sangat penting untuk menciptakan kegiatan agar menjadi efektif dan efisien. Perlu adanya pengawasan baik dari pimpinan umum. Salah satunya dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pengajian santri harus dan perlu adanya pengawasan baik dari pimpinan umum pondok pesantren maupun dari pengurus serta keamanan pesantren.

Pimpinan umum pondok pesantren dan seluruh elemen pondok pesantren Al-Mu'awanah Salafiyah telah menerapkan dan menerapkan sistem pengawasan. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah merupakan pondok pesantren yang tujuan didirikannya adalah untuk mengabdikan kepada mereka yang mempunyai keinginan mempelajari ilmu agama agar lebih berhati-hati dan siap dalam melaksanakan dan menghadapi kehidupan sesuai dengan hukum. Syariah'. Pondok pesantren yang berada di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ini mayoritas santrinya berasal dari mahasiswa aktif dari berbagai kampus di sekitar Cibiru. Sistem pendidikan yang digunakan pada pondok pesantren ini memakai sistem pendidikan tradisional (*salafiyah*) yang dimana sistem ini telah digunakan sejak awal berdirinya pondok pesantren yang didirikan oleh K.H Raden Eman Badruzzaman dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Selanjutnya, estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah digantikan oleh K.H Deden Haedar Badruzzaman, beliau ialah putera dari K.H Eman Badruzzaman. Selanjutnya Ustadz Iwan Hermawan, cucu K.H. Deden Haedar Badruzzaman, diberi tanggung jawab mengelola Pondok Pesantren. Terpilihnya Ustadz Iwan Hermawan menciptakan tim kepengurusan yang

berimbang, dengan K.H. Deden Hedar berperan sebagai pembina sekaligus pimpinan dan Ustadz Iwan Hermawan berperan sebagai pelaksana sekaligus pengasuh. Saat ini, Ustadz Iwan Hermawan, menantu K.H. Deden Hedar, terus menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah.

Pondok pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah telah melakukan sistem kontroling kepada para santrinya, semua itu dikerahkan dalam upaya proses pelaksanaan kegiatan pengajian santri yang telah terjadwal, salah satu yang telah terjadwal adalah kegiatan rutinitas yang dimulai pagi hingga malam hari. Adapun kegiatan khusus pengajian santri yang lain yakni dilangsungkan pada Kamis malam, kegiatan tersebut yakni pembacaan yasin serta tahlil bersama yang dalam prosesnya dipimpin langsung oleh pimpinan umum pondok pesantren.

Kemudian, di dalam Pondok Pesantren ini telah menerapkan tata tertib dan peraturan untuk para santri agar mereka patuh serta taat kepada peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren tersebut, ada penghargaan bagi santri yang taat dan patuh dengan peraturan pesantren dan tentunya ada yang diberikan hukuman untuk mereka yang melanggarnya. Akan tetapi kenyataannya, tidak jarang di antara para santri yang melanggar aturan-aturan dengan berbagai dalih karena tidak mengikuti kegiatan pengajian santri tersebut, kendatipun peraturan telah diberlakukan dan jadwal sudah terpangpang. Tidak jarang pula di kalangan santri yang menggunakan gadget mereka lebih banyak memanfaatkan gadget tersebut bukan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti memperkaya referensi tentang keagamaan dan yang lainnya tetapi mereka lebih banyak memanfaatkannya untuk scrolling sosial media, bahkan ada pula bagian dari mereka yang ketika

diberikan izin menggunakan gadget hanya untuk bermain game hingga larut malam. Selanjutnya perihal perizinan perpulangan santri. Ketimbang dahulu, kini mereka dengan sangat mudah mendapatkan izin perpulangan. Tak sampai di situ, bahkan ada tak jarang pula yang dengan langsung pulang namun tidak meminta izin kepada DPS sebelumnya terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi salah satu indikator kurangnya kedisiplinan santri yang disebabkan sistem pengawasan yang ada di pondok pesantren Al-Mu'awanah ini kurang efektif. Oleh karena itu, pimpinan pondok pesantren mempunyai kewajiban untuk menciptakan sistem pengawasan yang efisien terhadap kegiatan pengajian santri agar kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian lebih lanjut mengenai judul tersebut dipandang perlu berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas: "Peran Pengawasan Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengajian Santri".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan sehingga pengkajian tidaklah meluas dari masalah, sehingga mudah dipahami pada perolehan pengkajiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga bisa dikemukakan perumusan permasalahan ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana standarisasi sistem pengawasan yang diterapkan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengajian Santri?
2. Bagaimana proses evaluasi sistem pengawasan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengajian Santri?

3. Bagaimana tindakan perbaikan sistem pengawasan Pimpinan Pondok Pesanteren Salafiyah Al-Mu'awanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengajian Santri?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standarisasi sistem pengawasan yang diterapkan Pimpinan Pondok Pesanteren Salafiyah Al-Mu'awanah dalam kegiatan pengajian santri
2. Untuk mengetahui Proses evaluasi sistem pengawasan Pimpinan Pondok Pesanteren Salafiyah Al-Mu'awanah dalam kegiatan pengajian santri
3. Untuk mengetahui tindakan perbaikan sistem pengawasan Pimpinan Pondok Pesanteren Salafiyah Al-Mu'awanah dalam kegiatan pengajian santri

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkini mengenai efektifitas sistem pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pimpinan pesantren terhadap kegiatan pengajian yang didirikannya, bagi mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Sunun Gunung Djati Bandung. .

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi/institusi dalam memahami ilmu manajemen khususnya

instansi/organisasi tempat penelitian penulis dilakukan, serta dapat menjadi bahan referensi di lapangan. Sehingga dalam penerapan sistem pengawasan dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas kegiatan mengaji santri di pondok pesantren dapat terwujud.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di Kampung Lio Warunggede, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Jawa Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah. Penulis memilih lokasi karena memang di Pondok Pesantren Al-Mu'awanah ini ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan salah satu dari empat fungsi manajemen yakni *controlling* (pengawasan) yang membahas bagaimana cara untuk melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan pada sebuah lembaga dalam hal ini adalah Pondok Pesantren. Sehingga menurut penulis, lokasi tersebut cocok serta memadai untuk dijadikan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 2023.

F. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk menghindari kesamaan penulisan serta tindakan plagiarisme, kami ingin menyampaikan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, terdapat sebuah skripsi yang ditulis oleh Mayu Shofa, NPM: 1341030015, dari Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Judul skripsinya adalah "*Fungsi*

Pengawasan Pondok Pesantren Modern NU Terhadap Peningkatan Pelaksanaan Ibadah Sholat Santri Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus". Dalam penelitiannya Shofa melihat bagaimana pengawasan yang lebih baik di Pondok Pesantren Modern NU dapat membantu anak-anak di Desa Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, mendapatkan layanan salat yang lebih baik. Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan wawancara langsung dengan lima belas peserta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala ruangan bertugas melakukan pengawasan di pondok pesantren.

Kedua, ada skripsi dari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, NPM: 0941030023 yang ditulis oleh Irwan Saputra. Judul disertasinya adalah "*Gaya Kepemimpinan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung*". Dalam kajiannya, Saputra melihat filosofi kepemimpinan yang diterapkan pada Pondok Pesantren Al-Hikmah dalam pengembangan sumber daya manusia Bandar Lampung. Penelitian ini berpusat pada gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pimpinan umum pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya seorang pemimpin dapat mempengaruhi kemajuan sumber daya manusia di dalam institusinya. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Irwan Saputra.

2. Landasan Teoritis

a. Pengawasan

1) Pengertian Pengawasan

Menurut Yahya (2006:133) pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. (Kadarisman, 2013:172)

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- a) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. (Zamani, 1998: 132)
- c) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. (Sondole, dkk. 2015: 652)
- d) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut.
“*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). (Handayani, 1985:143)

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c) Tujuan
- d) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. (Simbolon, 2004: 61)

2) Macam-macam Pengawasan

- a) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula

melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*. (Simbolon, 2004: 62)

b) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

c) Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

d) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit. (Simbolon, 2004: 64)

3) Metode Pengawasan

a) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control. (Simbolon, 2004: 65)

b) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam

memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya. (Simbolon, 2004: 67)

4) Proses Pengawasan

Dikemukakan oleh Handoko dalam Hayani (2014:100) bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu:

- a) Penetapan standar pelaksanaan
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
- d) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
- e) Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan

Menurut Manullang (2008:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari:

- a) Menetapkan Alat Ukur (Standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

- b) Mengadakan Penilaian

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standard*) yang sudah

ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

c) Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corective Action*)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar.

5) Konsep Dasar Pengawasan dalam islam

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:

- a) Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b) Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c) Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

Adapun hadist-hadist yang mendukung pengawasan dalam islam yaitu:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

b. Pondok Pesantren

Menurut pemahaman dasarnya, pesantren adalah tempat di mana para santri belajar, sementara kata "pondok" mengacu pada rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Selain itu, kata "pondok" juga memiliki akar kata dari bahasa Arab "funduq" yang berarti hotel atau asrama (Zamaksyari Dhofier, 1985:18).

Menurut Lembaga Penelitian Islam (pesantren luhur), pesantren didefinisikan sebagai tempat yang tersedia bagi para santri untuk belajar agama Islam dan juga sebagai tempat berkumpul dan tinggal (Mujamil Qomar, 2005:2).

Menurut Binti Maunah (2009:18), terdapat komponen penting tertentu yang khusus ada di lingkungan pesantren. Lima atribut pesantren berikut ini menggambarkan komponen penting tersebut:

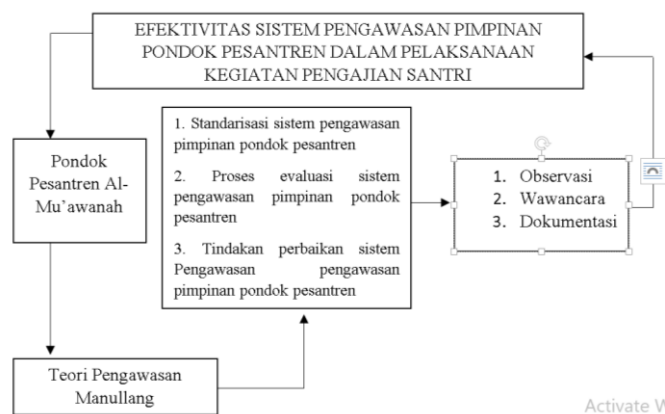
1. Kiai yang berperan sebagai pembimbing, pengajar, dan pendidik.
2. Santri yang mendapat petunjuk dari Kai.
3. Masjid adalah tempat berkumpulnya shalat, pendidikan, dan keperluan lainnya.
4. Asrama Mahasiswa, Pondok.
5. Menelaah sastra kuning atau klasik.
6. Pengejaran akademis.

Istilah “pengajian” secara etimologi berasal dari kata inti “kaji” yang berarti pelajaran, khususnya dalam arti keagamaan. Gabungan awalan “pe” dan akhiran “an” menghasilkan kata “pengajian” yang dapat merujuk pada lokasi penerapan ajaran Islam dan kata kerja “pengajian” yang menggambarkan pengajaran ilmu agama Islam. Digunakan dengan berbagai macam frase, seperti “majelis ta’lim”. Pengajian diartikan sebagai suatu kegiatan pendidikan Islam yang di dalamnya sekelompok individu dibimbing oleh seorang guru Al-Quran (da’i) (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1997: 120).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengajian merupakan kegiatan pembelajaran khususnya dalam ilmu agama Islam yang disampaikan oleh guru atau kiai kepada para mustami atau jamaah pengajian. Pengajian bisa bersifat khusus, hanya diikuti oleh sekelompok tertentu seperti di pesantren oleh para santri, atau bersifat umum yang dapat diikuti oleh siapa saja seperti tablig akbar. Pengajian juga merupakan bentuk dakwah yang efektif dalam

menyebarkan agama Islam, serta merupakan unsur penting dalam syiar dan pengembangan agama Islam. Dalam konteks dakwah Islamiyah, pengajian menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mewujudkan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan.

G. Kerangka konseptual



Tabel 1.1 Kerangka Konseptual

H. Langkah-langkah penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan, yang tentunya terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah Kabupaten Bandung. Pemilihan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah Kabupaten Bandung dipilih karena terdapat beberapa masalah terkait dengan fungsi manajemen, khususnya pengendalian (*controlling*), yang membahas cara melakukan pengawasan terhadap kegiatan di lembaga tersebut, dalam hal ini pesantren. Oleh karena itu, menurut penulis, lokasi tersebut sesuai dan cocok untuk menjadi tempat penelitian. Penelitian ini direncanakan

akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April tahun 2023, menyesuaikan dengan waktu dan kondisi di lapangan.

2. Paradigma dan Pendekatan

Konstruktivisme adalah paradigma yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut pendekatan ini, kebenaran suatu realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah. Para peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada ideologi postpositivis. Metode ini digunakan untuk melihat keadaan benda-benda alam, dengan peneliti sebagai alat vitalnya. Pendekatan purposif dan snowball digunakan untuk pengambilan sampel data, sedangkan triangulasi (kombinasi) digunakan untuk pengumpulan data. Metode induktif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis data, dan temuannya lebih mengutamakan makna daripada generalisasi (Sadiah, 2015:19).

3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini. Tujuan metode ini, sebagaimana dijelaskan oleh Whitney (1960:160), adalah untuk mencari fakta dengan interpretasi yang akurat terhadap masalah yang diselidiki dan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Informasi Asli Data primer adalah fakta-fakta tertentu mengenai suatu topik yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki peneliti (informan). Kasus yang melibatkan manusia, hewan, atau entitas lain dapat dijadikan sebagai data primer (Sadiah, 2015: 87). Alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah peneliti, dan informan pilihan adalah Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah Kabupaten Bandung.
- 2) Informasi Sekunder Data sekunder adalah informasi yang dapat diakses oleh peneliti melalui membaca, menonton, atau mendengarkan materi yang telah dipublikasikan sebelumnya, namun tidak diberikan secara langsung kepada mereka (Sugiyono, 2016: 309). Para sarjana dapat memperoleh bahan sekunder dari berbagai sumber, termasuk buku, makalah, jurnal, dan publikasi lain yang memfasilitasi pelaksanaan penelitian mereka.

b. Jenis Data

Ada dua kategori utama data yang digunakan: data kualitatif dan kuantitatif. Penulis penelitian ini memilih untuk menganalisis data kualitatif. Mayoritas data kualitatif diucapkan atau ditulis, dan sering kali

dikumpulkan melalui wawancara. Menurut Sugiono (2012:9), metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan postpositivisme, yang mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, triangulasi digunakan dalam teknik pengumpulan data, dilakukan analisis data kualitatif, dan penekanan pada temuan penelitian. pada makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode tersebut untuk mengevaluasi proses kegiatan pengajian santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah, yang seluruhnya terfokus pada satu aspek utama, yaitu proses pengawasan. Marimin, Hendri Tanjung, dan Haryo Prabowo (2006:1) mengungkapkan bahwa pengawasan dalam suatu lembaga pondok pesantren harus dilakukan secara intensif guna mencapai tujuan utama. Sistem dijelaskan sebagai kesatuan usaha yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan berupaya mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompleks. Konsep ini menyoroti kompleksitas sistem yang melibatkan kerjasama antar bagian yang saling bergantung satu sama lain.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pelaksanaan kinerja pegawai di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah Kabupaten Bandung. Pengamatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung secara sistematis (Sadiah, 2015: 87).

2. Wawancara

Menurut Denzim, adalah percakapan tatap muka di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Menurut Black dan Champion (1976), wawancara adalah komunikasi verbal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Definisi yang lebih rinci disampaikan oleh Steward dan Cash (2000), bahwa wawancara merupakan proses interaksi komunikasi antara dua pihak, salah satunya memiliki tujuan yang serius, yang melibatkan tanya jawab (Fadhallah, 2021: 1). Teknik wawancara digunakan untuk menggali data dan fakta yang belum terungkap selama tahap observasi. Pewawancara melakukan wawancara kepada pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah/Rois dan para stafnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan teknik penting dalam penelitian ini, selain observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah informasi tentang kegiatan penelitian terkait kinerja pegawai di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah Kabupaten Bandung.

J. Teknik Analisis Data

Muri Yusuf merujuk pada Fossey untuk menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang meliputi review, pemeriksaan, sintesis, dan interpretasi data yang terkumpul. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau situasi sosial yang sedang diteliti (Yusuf, 2017:400). Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model Miles dan Huberman, yang terbagi menjadi tiga tahap:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama penelitian cenderung banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, dilakukan analisis data melalui proses reduksi. Reduksi data melibatkan pemilihan, pengorganisasian, penyempurnaan, fokus, dan penghapusan data dalam suatu cara tertentu agar kesimpulan akhir dapat dihasilkan dan diverifikasi (Yusuf, 2017: 408). Langkah awal dalam reduksi data adalah membaca secara intensif dan kritis terhadap sumber informasi yang terkumpul, kemudian membatasi pokok-pokok permasalahan untuk fokus pada pembahasan tertentu.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengorganisasian informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan (Yusuf, 2017: 408). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mencatat dan memberi makna pada informasi sejak awal pengumpulan data. Catatan yang dibuat luas dan lengkap.

3. Klarifikasi

Klarifikasi adalah tindakan untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas dan mudah dipahami, serta untuk menghilangkan ambiguitas. Ini mencakup penjelasan dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya tentang data yang disajikan.

4. Tafsir

Tafsir adalah kegiatan untuk mengartikan, menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran data.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum diketahui. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi obyek yang sebelumnya tidak jelas, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah interpretasi peneliti terhadap temuan dari wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti memeriksa kembali kebenaran interpretasi dengan mengecek ulang penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi.